

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PROSES PEREKRUTAN PEGAWAI P3K (PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA) PADA TENAGA HONORER GURU
DI KABUPATEN OKU TAHUN 2020-2021**

Oleh
Febi Triwahyudi

ABSTRAK

Perekrutan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak lepas dari peranan pemerintah didalamnya, dimana dalam kegiatan perekrutan PPPK pemerintahlah yang mengusulkan agar hal ini terjadi guna memberikan tempat yang layak bagi setiap guru yang sudah mengabdi atau mengajar sebagai honorer bertahun-tahun lamanya. Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui tentang Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Proses perekrutan Pegawai P3k (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Pada Tenaga Honorer Guru Di Kabupaten Oku Tahun 2020-2021, menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dengan data di peroleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu kin Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Proses perekrutan Pegawai P3K.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan bahwa Perekrutan PPPK tenaga honorer guru dilaksanakan secara transparan persyaratan yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> hasil seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>. Dalam perekrutan PPPK tahun 2021 setiap guru honorer memiliki hak yang sama dalam seleksi hanya saja setiap guru harus terdaftar didapodik untuk dapat mengikuti seleksi PPPK. Kegiatan PPPK sudah efektif dan efisien hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki Kabupaten OKU pada anggaran 2021. Saran dalam penelitian ini hendaknya pemerintah dapat mengangkat seluruh tenaga honorer guru menjadi ASN PPPK yang disesuaikan dengan formasi yang tersedia dan anggaran yang dimiliki daerah Kabupaten OKU. Pemerintah harusnya lebih cepat menyelesaikan permasalahan pengakatan guru honorer menjadi ASN PPPK. Hendaknya pemerintah Kabupaten OKU melakukan pemetaan tenaga honorer yang lebih baik sehingga tenaga honorer guru dapat mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

Kata Kunci: *Implementasi, Prinsip-Prinsip Good Governance, PPPK, Honorer.*

IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE RECRUITMENT PROCESS OF P3K EMPLOYEES (GOVERNMENT EMPLOYEES WITH EMPLOYMENT AGREEMENT) ON HONORER EMPLOYEE TEACHERS IN OKU DISTRICT 2020-2021

*By
Febi Triwahyudi*

ABSTRACT

Recruitment of PPPK or government employees with work agreements cannot be separated from the government's role in it, where in PPPK recruitment it was the government that proposed that this happen in order to provide a proper place for every teacher who has served or taught as honorary for many years. This research is intended to find out about the Implementation of the Principles of Good Governance in the Recruitment Process for P3k Employees (Government Employees with Work Agreements) for Honorary Teacher Staff in Oku Regency in 2020-2021, using a qualitative descriptive method and with data obtained from interviews, observations and documentation. The unit of analysis in this study is the Principles of Good Governance in the Process of Recruiting First Aid Employees. Based on the results of the research conducted, the recruitment of PPPK temporary teachers is carried out in a transparent manner. The requirements uploaded on the <https://sscasn.bkn.go.id> page, the results of the administration selection will be announced via the <https://sscasn.bkn.go.id> and <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>. In recruiting PPPK in 2021 every honorary teacher has the same rights in selection, it's just that each teacher must be registered at the Islamic boarding school to be able to take part in the PPPK selection. PPPK activities have been effective and efficient, this is in accordance with the regulations set by the government which are adjusted to the budget owned by OKU Regency in the 2021 budget. The suggestion in this research is that the government should be able to appoint all honorary teacher workers to become ASN PPPK according to the available formations and the budget owned by the OKU Regency area. The government should be quicker to resolve the issue of hiring honorary teachers to become ASN PPPK. The OKU Regency government should conduct a better mapping of honorary staff so that honorary teacher workers can get better welfare.

Keywords: *Implementation, Principles of Good Governance, PPPK, Honorary.*